

## UPAYA PENINGKATAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN TABANAN

I Wayan Sastrawan<sup>1</sup>, Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti<sup>2</sup>, dan Ngk. Md. Anom wiryasa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Udayana

<sup>2</sup> Email: [sastrakeni@gmail.com](mailto:sastrakeni@gmail.com)

### ABSTRAK

Rumah Layak Huni yang merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan yang berbasis kepada keswadayaan bagi mereka yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui RPJMD telah merencanakan Program Rehabilitasi RTLH dari tahun 2016 sampai dengan 2020 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.325 unit. Namun, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), target tersebut tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Tabanan perlu di evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BSPS selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, serta untuk merumuskan upaya peningkatan pelaksanaan program BSPS tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa RPJMD, Renstra, Lakip dan dokumen BSPS Kabupaten Tabanan. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara menggunakan instrument daftar pertanyaan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan terkait program BSPS, serta metode *focus group discussion (FGD)* untuk merumuskan upaya peningkatan pelaksanaan program BSPS.

Evaluasi program BSPS mengacu pada perencanaan RPJMD dan BSPS yang mencakup 6 indikator yaitu sosialisasi, anggaran (rencana anggaran), tepat sasaran (obyek penerima bantuan), tepat tujuan (obyek konstruksi), tepat waktu, efisiensi (realisasi anggaran). Hasil evaluasi menunjukkan Program BSPS dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 telah memenuhi indikator sosialisasi, tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Program BSPS belum tercapai ditinjau dari indikator anggaran, efisiensi dan indikator tepat tujuan.

Tidak tercapainya indikator anggaran, tepat tujuan dan efisiensi disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran pada program BSPS, sehingga perlu diupayakan penambahan alokasi anggaran dari Pemerintah pusat, pendampingan anggaran dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta partisipasi dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).

**Kata kunci:** Efektifitas, efisiensi, MBR, RTLH

## EFFORTS TO IMPROVE THE INDEPENDENT HOUSING STIMULANT ASSISTANCE PROGRAM (BSPS) IN TABANAN DISTRICT

### ABSTRACT

Livable home is a basic human need so that the government needs to play a greater role in providing and giving housing facilities and assistance based on self-sufficiency for those belonging to *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)* or Low-Income Communities. The Tabanan Regency Government through the RPJMD has planned the RTLH Rehabilitation Program from 2016 to 2020 through the *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)* or Self-Help Housing Stimulant Assistance Program of 3,325 units. However, based on the *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)* or Government Agency Performance Report of the Public Works Department of Spatial Planning, Housing and Settlement Areas (PUPRPKP), this target was not achieved, so the

implementation of the BSPS program in Tabanan Regency needs to be evaluated. This study aimed to evaluate the implementation of the BSPS program during the period 2016 – 2020, as well as to formulate efforts to improve the implementation of the BSPS program.

This study used a qualitative method. The data in this study consisted of secondary data in the form of RPJMD, Strategic Plan, Lakip and Tabanan Regency BSPS documents. While the primary data were the results of interviews using a questionnaire to evaluate the implementation and problems related to the BSPS program, as well as the focus group discussion (FGD) method to formulate efforts to improve the implementation of the BSPS program.

The evaluation of the BSPS program referred to the RPJMD and BSPS planning which includes 6 indicators, namely socialization, budget (budget plan), right on target (suitable for the object of assistance recipients), right on purpose (suitable for construction object), on time, efficiency (budget realization). The evaluation results showed that the BSPS Program had met the socialization indicators, right on target and on time. However, the BSPS Program had not been achieved in terms of budget, efficiency and target indicators.

The lack of budget and efficiency indicators was caused by the lack of budget allocation for the BSPS program, so it was necessary to increase the budget allocation from the central government, budget assistance from the Provincial and Regional Governments and participation from CSR (Corporate Social Responsibility).

**Keywords:** Effectiveness, efficiency, MBR, RTLH

## 1 PENDAHULUAN

Permasalahan secara umum yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat adalah laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat menyebabkan kebutuhan akan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sementara dari sisi ketersediaan akan rumah belum mampu memenuhi peningkatan tersebut. Berdasarkan data tentang target kinerja Rencana Strategis (Renstra) dari DPUPRPKP pada program Rehabilitasi RTLH dari tahun 2016 sampai dengan 2020 direncanakan sebanyak 3.325 unit RLH. Namun realisasi RLH yang termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPUPRPKP dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 hanya 2.261 unit.

Adanya ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan RLH masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Percepatan terwujudnya RLH bagi masyarakat, yang telah tertuang dalam (Perda Kabupaten Tabanan nomor 11 tahun 2017(2017) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sememesta Berencana (RPJMD-SB) sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan perbaikan perumahan melalui Direktorat Jenderal Pengadaan perumahan Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan bertujuan untuk membangun atau mewujudkan RLH, yang termuat dalam (Permen PUPR Nomor, 2016 (2016) tentang BSPS. Realisasi program BSPS dari tahun 2016 sampai 2020 sejumlah 2.261 unit (68%) dari rencana 3.325 unit. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya target kinerja perbaikan RLH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BSPS dan merumuskan upaya peningkatan pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Tabanan. Evaluasi pelaksanaan program BSPS diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program yang mengacu kepada 6 indikator yaitu: sosialisasi, anggaran/biaya, tepat sasaran, tepat tujuan, tepat waktu, dan efisiensi.

## 2 UPAYA PENINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM BSPS

Upaya peningkatan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk proses perbaikan. Salah satu pendekatan yang dipakai dalam melaksanakan peningkatan mutu proses pada suatu organisasi adalah dengan metode *Plan, Do, Check, Action (PDCA)*. Menurut

Purwanto (2012) siklus *PDCA* adalah suatu metode perbaikan kualitas secara berkesinambungan yang didasarkan pada prinsip perlu memahami situasi atau proses, sebelum melakukan langkah perbaikan dan peningkatan. Siklus *PDCA* merupakan suatu metode sistematis untuk perbaikan proses secara terus-menerus, yang pertama kali dikembangkan oleh Walter Shewhart, dan dipopulerkan di Jepang oleh Edwards Deming. Siklus *PDCA* juga dikenal sebagai Siklus *Deming*, atau sebagai *Spiral Continuous Improvement* yang merupakan sistem perbaikan kualitas secara berkelanjutan yang terdiri dari empat langkah berulang untuk perbaikan secara terus menerus. Proses perbaikan dalam *PDCA* dilakukan melalui 8 langkah yaitu:

- *PLAN* adalah: tahap perencanaan yang terdiri dari: 1. Menentukan tema yaitu: RLH bagi MBR yang termuat dalam RPJMD dan Renstra. 2. Menentukan target dan sasaran, target diartikan pada berapa kebutuhan RLH pada periode tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sedangkan penentuan sasaran lebih kepada objek yang ingin dituju yaitu MBR. 3. Menentukan program yaitu program BSPS.
- *Do* merupakan Pelaksanaan dari program BSPS yang telah ditentukan mengacu kepada seluruh aturan dan petunjuk dalam program tersebut.
- *Check* merupakan evaluasi dari program BSPS dengan cara menilai antara pelaksanaan dengan perencanaan Yang selanjutnya untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program BSPS yang mengacu kepada tercapai atau tidaknya indikator yang ditentukan.
- Analisis faktor penyebab adalah penelusuran lebih lanjut terhadap penyebab tidak tercapainya indikator dengan menggunakan metode *Fishbone* .
- *Act* yang terdiri : standarisasi dan upaya peningkatan

## 2.1 *RPJMD dan Renstra*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen yang berisikan penjabaran dari visi, misi, dan program dari kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah. Dalam RPJMD ditetapkan indikator kinerja Daerah untuk urusan Perumahan dan Kawasan permukiman yang ditampilkan dalam Tabel 2. 1

Tabel 2. 1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja		
	Tahun	Anggaran (Juta Rupiah)	Target (unit)
Rumah layak huni	2016	12.000	600
	2017	13.000	650
	2018	13.500	675
	2019	14.000	700
	2020	14.000	700
	2021	14.000	700

(Sumber: RPJMD Kabupaten Tabanan)

Renstra pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia sesuai potensi yang ada dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun. Salah satu tugas pokok DPUPRPKP yang termuat dalam Renstra adalah Membantu masyarakat dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.

## 2.2 *Program BSPS*

Salah satu Program perbaikan rumah bernama BSPS yang tertuang dalam Permen PUPR Nomor : 13/PRT/M/2016 (2016) BSPS adalah singkatan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, berupa stimulan/ perangsang bagi MBR untuk

meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bentuk Bantuan dalam Program BSPS berupa uang dan berupa barang. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan adalah: a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga; b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni; d. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan; dan e. MBR dengan batas penghasilan rumah tangga sebesar Rp 3.405.000, sesuai dengan Permen PUPR Nomor : Permen PUPR Nomor : 21/PRT/M/2016 (2016) yang diperbaharui dengan Permen Permen PUPR Nomor: 10/PRT/M/2019 (2019)

### 2.3 Lakip

Lakip merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran seperti termuat dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun (2014), (2014). Pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Berikut adalah tabel Lakip RLH dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2. 2 Lakip RLH

Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
Ren cana	Reali sasi (Unit)	Ren cana	Reali sasi (Unit)	Ren cana	Reali sasi (Unit)	Ren cana	Reali sasi (Unit)	Ren cana	Reali sasi (Unit)
600	200	650	365	675	642	700	445	700	609

### 2.4 Indikator

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI) indikator adalah: sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sesuatu yang bisa digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Keberhasilan ataupun kegagalan suatu program perlu dinilai berdasarkan tolok ukur atau indikator yang jelas. Demikian pula untuk Program BSPS di Kabupaten Tabanan yang terlaksana dari tahun 2016 sampai 2020 dilakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dengan mengacu pada indikator perencanaan program BSPS sebagai berikut:

- Indikator sosialisasi yaitu: acuan yang dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui berapa jumlah peserta sosialisai dan sejauh mana informasi dari program BSPS dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta sosialisasi.
- Indakator anggaran: acuan untuk mengukur alokasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran pada tahun program.
- Indikator tepat sasaran yaitu: acuan untuk mengukur apakah Program BSPS disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan ktiteria sebagai penerima bantuan.
- Indikator tepat tujuan: acuan untuk mengukur penyelesaian 8 skup pekerjaan yaitu : 1. Pekerjaan atap, 2. Kap/ kuda- kuda, 3. Dinding, 4. Lantai, 5. Pondasi, 6. Struktur, 7. Luas bangunan, dan 8. MCK.
- Indikator tepat waktu yaitu: acuan untuk mengukur pelaksanaan konstruksi apakah sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- Indikator efisiensi yaitu : untuk mengukur prosentase penggunaan dana / anggaran terhadap alokasi anggaran dalam penyelesaian target pada indikator tepat tujuan.

### 2.5 Evaluasi

Menurut Wirawan (2012) dan Arikunto (2008) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai obyek evaluasi, menilai dan membandingkan antara pelaksanaan dengan indikator dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai obyek yang dievaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Evaluasi juga merupakan salah satu sarana yang penting dalam melakukan penilaian pelaksanaan serta hasil dari obyek evaluasi, yang selanjutnya dipakai untuk memperbaiki kegiatan tersebut. Sehingga tanpa

evaluasi tidak akan diketahui bagaimana pencapaian dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wirawan (2012) evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya di antaranya adalah:

1. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
3. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan indikator program yang tercapai, mana yang tidak tercapai.
4. Mengukur efektifitas dan efisiensi.

Dalam Program BSPS di Kabupaten Tabanan dari tahun 2016 sampai 2020 evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan antara rencana yang tertuang dalam 6 indikator program dengan realisasi sehingga dapat dinilai mana yang telah tercapai dan yang tidak tercapai, yang selanjutnya dapat diukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program BSPS.

## 2.6 Upaya peningkatan

Salah satu pendekatan yang dipakai dalam melaksanakan peningkatan mutu proses pada suatu organisasi adalah dengan metode *Plan, Do, Check, Action (PDCA)*. Menurut Purwanto, (2012) siklus *PDCA* adalah suatu metode perbaikan kualitas secara berkesinambungan yang didasarkan pada prinsip perlu memahami situasi atau proses sebelum melakukan langkah perbaikan dan peningkatan. Istilah perbaikan kualitas secara berkesinambungan (*continuous improvement*) pada dasarnya mengacu pada konsep Kaizen di Jepang. Siklus *PDCA* merupakan suatu metode sistematis untuk perbaikan proses secara terus-menerus, yang pertama kali dikembangkan oleh Walter Shewhart. Di Jepang dipopulerkan oleh Edwards Deming. Siklus *PDCA* juga dikenal sebagai Siklus *Deming*, atau sebagai *Spiral Continuous Improvement*. Ini berasal pada tahun 1920 yang dimotori oleh Mr Walter A. Shewhart yang memperkenalkan konsep *siklus Shewart* sebagai: *Plan, Do, Study, dan Act*. Selanjutnya Deming memodifikasi pemikiran Steward dengan konsep siklus *Plan, Do, Check, Act (PDCA)*. Dalam *PDCA* Proses perbaikan dilakukan melalui 8 langkah yaitu:

### - Plan

*Plan* merupakan tahap perencanaan dalam tahapan *PDCA* yang dibagi menjadi tiga langkah antara lain :

1. Menentukan tema/ judul
2. Menentukan target dan sasaran
3. Menentukan program

### - Do

4. *Do* merupakan Pelaksanaan dari program BSPS yang telah ditentukan mengacu kepada seluruh aturan dan petunjuk dalam program tersebut.

### - Check

5. *Check* atau evaluasi adalah menilai dan mencocokkan antara pelaksanaan dengan perencanaan..

6. Analisis faktor penyebab

Dalam evaluasi program BSPS tidak tercapainya target indikator perlu ditelusuri lebih lanjut penyebab tidak tercapainya target tersebut dengan menggunakan metode *fishbone*. Dalam analisis *fishbone* akan ditemukan penyebab dari tidak tercapainya target indikator sehingga perlu dicarikan suatu solusi yang kemudian dibuatkan standar dalam upaya perbaikan. Langkah untuk mencari solusi dalam upaya perbaikan dilakukan melalui *FGD*.

### - Act

7. Standarisasi merupakan solusi dari permasalahan yang dilakukan melalui *FGD*.

8. Upaya perbaikan adalah: melaksanakan standarisasi untuk perbaikan pelaksanaan program.

## 3 METODE

Untuk evaluasi Kinerja Program BSPS berdasarkan data sekunder yaitu LAKIP. Hasil yang didapatkan pada tahap ini adalah perbandingan rencana target dengan realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Metode analisis data pada tahap ini adalah dengan metode analisis data yaitu membandingkan antara rencana dan realisasi target kinerja. Realisasi yang dibawah target akan dipergunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi lebih lanjut dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

Program BSPS dengan cara menilai pencapaian terhadap 6 target indikator. Pengambilan sample menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sample dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2013), sehingga wawancara dilakukan pada orang-orang yang dipandang tahu tentang suatu permasalahan dan akhirnya mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber yang ditentukan pada tahap wawancara, yaitu: Ketua Tim teknis BSPS Kabupaten Tabanan, Koordinator Fasilitator (Korfes) Ketua Penerima Bantuan (KPB), Penerima bantuan (PB) dan toko penyedia bahan bangunan Program BSPS. Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data dilakukan Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari evaluasi menunjukkan capaian dibawah target sehingga perlu dilakukan analisis penyebab menggunakan metode *Fishbone*. Dari hasil analisis *fishbone* didapat penyebab tidak tercapainya target sehingga perlu dicarikan solusi sebagai upaya peningkatan. Salah satu cara untuk mendapatkan solusi tersebut adalah melalui *FGD*. Menurut Irwanto (2006) pengertian *FGD* ialah proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis tentang permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. *FGD* dilakukan bersama narasumber: Kabid Infrastruktur dan pengembangan wilayah (Bapelitbang), Sekretaris DPUPRPKP, Kepala bidang Perumahan DPUPRPKP, Kepala bidang permukiman DPUPRPKP, Ka.Subag keuangan DPUPRPKP, Kepala seksi perencanaan perumahan, Kepala seksi pembangunan dan pengelolaan perumahan, Kepala seksi pengawasan dan pengendalian untuk merumuskan upaya peningkatan pelaksanaan program BSPS.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Evaluasi kinerja

Penelitian awal dilakukan pada evaluasi kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan metode analisis data, yaitu membandingkan antara target kinerja yang mengacu kepada Renstra DPUPRPKP dengan realisasi kinerja selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang tertuang dalam Lakip DPUPRPKP Kabupaten Tabanan. Berikut tabel evaluasi kinerja Program perbaikan RLH dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dituangkan dalam *Tabel 4. 1*

Tabel 4. 1 evaluasi Kinerja  
Perbaikan RLH dari tahun 2016 sampai dengan 2020

No	Tahun	Target (unit)	Realisasi (unit)	Keterangan
	2016	600	200 (33.33%)	Target tidak tercapai
	2017	650	365 (56.15%)	Target tidak tercapai
	2018	675	642 ( 95.11%)	Target tidak tercapai
	2019	700	445 ( 63.57%)	Target tidak tercapai
	2020	700	609 (87%)	Target tidak tercapai
	Jumlah	3.325	2,261 (68%)	Selisih (- 1,064)

Hasil evaluasi kinerja Program Rehabilitasi RTLH yang tertuang dalam Tabel 4. 1, pada tahun 2016 realisasi 200 dari 600 unit yang direncanakan. Pencapaian target hanya 33,33%, yang artinya target tidak tercapai. Pada tahun 2017 dengan realisasi 365 dari 650 unit yang direncanakan dengan capain target 56,15%, sehingga target tidak tercapai. Pada tahun 2018 terealisasi 642 dari 675 unit yang direncanakan pencapain target 95,11%, sehingga target tidak tercapai. Di tahun 2019 terealisasi 445 dari 700 unit yang direncanakan pencapain target 87%, target di tahun ini juga tidak tercapai. Pada tahun 2020 realisasi 609 dari 700 unit yang direncanakan pencapaian target hanya 87%, yang artinya target tidak tercapai. Jika dijumlahkan pencapaian target dari tahun 2016 sampai 2020 terealisasi 2.261 unit dari 3325 unit yang

direncanakan sehingga pencapaian target sejumlah 1.064 unit ( 68%), yang bermakna target kinerja tidak tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari tahun 2016 sampai dengan 2020 target tidak tercapai sehingga langkah selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang lebih detail melalui evaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program BSPS.

#### 4.2 Evaluasi pelaksanaan program BSPS

Evaluasi Efektifitas dan efisiensi terdapat tiga indikator yang tidak tercapai yang tercantum dalam Tabel 4. 3 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Indikator Anggaran/ biaya

Tahun	Plan/ Target indikator (Rp)	Do/Realisasi	Pencapaian target indikator	Efektifitas dan efisiensi
2016	8,194,000,000	3,232,500,000	39.45% (tdk tercapai)	Tdk efektif
2017	7,586,000,000	5,080,000,000	66.96% (tdk tercapai)	Tdk efektif
2018	10,308,000,000	9,630,000,000	93.42% (tdk tercapai)	Tdk efektif
2019	9,879,000,000	7,787,500,000	78.83 % (tdk tercapai)	Tdk efektif
2020	14,465,000,000	10,657,500,000	73.68 % (tdk tercapai)	Tdk efektif
Jumlah	50,432,000,000	36,367,500,000	(72.15%).	

Indikator Anggaran yang tercantum dalam perencanaan (*Plan*) RPJMD, dan Renstra dengan target indikator anggaran di tahun 2016 sejumlah Rp 8,194,000,000; di tahun 2017 dengan target 7,586,000,000; Di tahun 2018 dengan target anggaran Rp 10,308,000,000; Ditahun 20019 dengan target Rp 9,879,000,000; di tahun 2020 anggaran yang targetkan sebanyak Rp 14,465,000,000. Dalam realisasi pelaksanaan (*Do*) mendapat alokasi anggaran pada masing-masing tahun sejumlah: di tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp 3,232,500,000 ( 39.45%). Di tahun 2017 alokasi anggaran Rp 5,080,000,000 ( 66.96%). Di tahun 2018 dialokasikan anggaran Rp 9,630,000,000 (93.42%). Ditahun 20019 mendapat alokasi anggaran Rp 7,787,500,000 (78.83). Demikian juga di tahun 2020 anggaran yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 10,657,500,000 (73.68 %). Jika dijumlah kan Rencana anggaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sejumlah Rp 50,432,000,000 namun mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp 36,367,500,000 (72.15 %). Dalam evaluasi (*Check*) menunjukkan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 pencapaian target indikator Anggaran tidak tercapai yang artinya pelaksanaan program BSPS pada indikator Anggaran tidak efektif. Sehingga dalam tahap perbaikan (*Act*) perlu dicari penyebab dari tidak tercapainya target pada indikator anggaran kemudian dicari solusi untuk upaya perbaikan.

##### 2. Indikator Tepat tujuan

Pada indikator Tepat tujuan yang juga direncanakan (*Plan*) pada program BSPS, pelaksanaannya (*Do*) di tahun 2016 dan 2017 dari 8 target yang ditentukan tidak tercapai. Di tahun 2018 8 target juga tidak tercapai. Dan pada tahun 2019 dan 2020 dari 8 target yang direncanakan tercapai. Dalam evaluasi (*check*) pada tahun 2016 sampai 2018 target tidak tercapai yang menunjukkan pelaksanaan program BSPS pada indikator Tepat tujuan tidak efektif yang selanjutnya pada tahap perbaikan (*Act*) perlu dicari apa yang menjadi penyebab dari tidak efektifnya indikator tepat tujuan untuk dicarikan solusi dalam upaya perbaikan. Berbeda halnya pada tahun 2019 dan 2020 dari 8 target indikator tercapai yang artinya pelaksanaan program BSPS efektif.

##### 3. Indikator Efisiensi

Pada tahap perencanaan (*Plan*) yang termuat dalam program BSPS Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 ditargetkan efisiensi 100% yang artinya dengan pagu anggaran, penyelesaian perbaikan rumah pada 8 skup pekerjaan dapat terselesaikan. Dalam pelaksanaan (*Do*) pada tahun 2016 nilai efisiensinya 110%. Di tahun 2017 nilai efisiensinya 107%. Pada tahun 2018 nilai efisiensinya 120%. Pada tahun 2019 dan 2020 dengan penilaian efisiensi 97%. Dalam evaluasi (*Check*) pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan penilaian efisiensi diatas 100% target indikator efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian pelaksanaan program pada indikator efisiensi

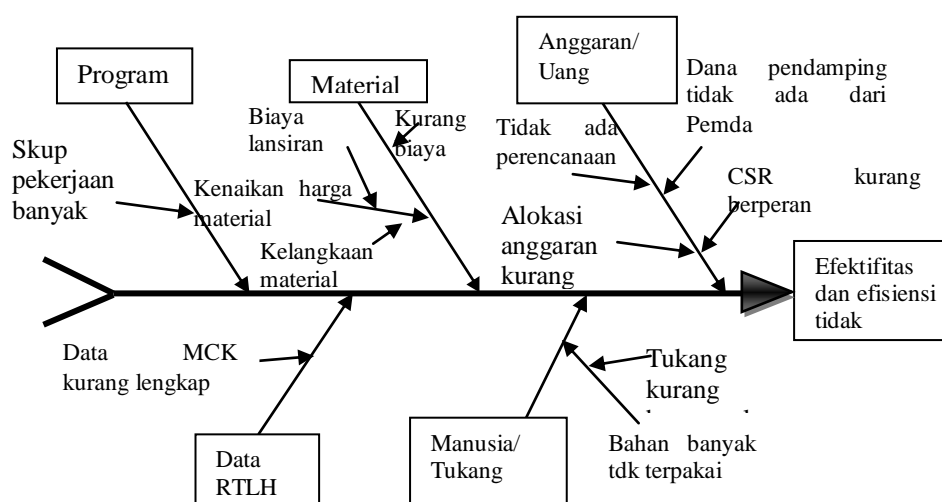
tidak efisien sehingga pada tahap perbaikan (*Check*) perlu dicari penyebabnya dan perlu dicarikan solusi untuk upaya perbaikan. Ditahun 2019 dan 2020 penilaian efisiensi berada dibawah 100% artinya target indikator tercapai sehingga pelaksanaan program BSPS pada indikator efisiensi di tahun 2018 dan 2019 efektif.

### 4.3 Analisis penyebab

Langkah pertama untuk mencari penyebab dari tidak efektif dan tidak efisiennya indikator anggaran/ biaya, tepat tujuan dan efisiensi pada pelaksanaan program BSPS dari tahun 2016 sampai 2020 adalah menemukan sebab utama dan sebab potensial. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan curah pendapat (*brainstorming*) dengan peserta 10 orang yang berasal dari instansi terkait yaitu Bappelitbang, dan DPUPRPKP. Dari hasil curah pendapat dirangkum dalam bentuk table faktor penyebab utama dan potensial seperti yang tertuang dalam Tabel 4. 2.

Tabel 4. 2 Faktor penyebab

No	Faktor penyebab utama	Faktor potensial
1	Anggaran/ Uang	- Tidak ada perencanaan/ perhitungan biaya perbaikan per unit rumah. - Alokasi anggaran kurang dari BSPS - Tidak ada dana pendamping dari Pemda. - Kurangnya peran serta CSR
2	Material	- Kenaikan harga material → Kelangkaan material pasir dan batu saat G. Agung Meletus. → Biaya lansiran bahan - Kekurangan biaya
3	Program	- Skup pekerjaan yang banyak
4	Data RTLH	- Data MCK kurang lengkap
5	Manusia/ Tukang bangunan	- Material banyak tidak terpakai → Tukang kurang berpengalaman.



Gambar 5. 1 Diagram Fishbone

### 4.4 Upaya peningkatan pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Tabanan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan indikator yang tertuang dalam perencanaan, diperlukan suatu perbaikan secara berkelanjutan terhadap indikator yang tidak efektif dan tidak efisien. Dari analisis penyebab menggunakan metode *Fishbone* teridentifikasi penyebab tidak efektif dan tidak efisiennya indikator anggaran/ biaya, tepat tujuan dan efisiensi.



Sehingga diperlukan solusi sebagai upaya perbaikan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan peserta dipilih berdasarkan pemahaman terhadap pelaksanaan program BSPS, dengan jumlah 7 orang yang terdiri dari instansi terkait yaitu: Bappelitbang dan DPUPRPKP seperti tercantum dalam **Error! Reference source not found.** Hasil dari FGD tertuang dalam Tabel 4. 3

Tabel 4. 3 Evaluasi penyebab dan upaya peningkatan Program BSPS

No	Indikator evaluasi	Check/ evaluasi			Penyebab	Act/ Perbaikan
		Tahun	Pencapaian target indikator	Efektifitas dan efisiensi		Upaya peningkatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Anggaran/ Biaya	- 2016	tdk tercapai	Tdk efektif	- Tidak ada perencanaan/ perhitungan biaya perbaikan per unit rumah.	Rencanakan kebutuhan biaya perbaikan per unit rumah
		- 2017	tdk tercapai	Tdk efektif	- Alokasi anggaran kurang dari BSPS	Buat usulan berbasis perencanaan dan target RLH
		- 2018	tdk tercapai	Tdk efektif	- Tidak ada dana pendamping dari Pemda.	Rencanakan alokasikan anggaran dalam RPJMD
		- 2019	tdk tercapai	Tdk efektif	- Kurangnya peran serta CSR	Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan CSR
		- 2020	tdk tercapai	Tdk efektif		
2	Tepat tujuan	- 2016	Tidak tercapai	Tdk efektif	- Bencana alam	Buat Juklak dan Juknis pelaksanaan program saat bencana alam
		- 2017	Tidak tercapai	Tdk efektif	- Biaya lansiran bahan	Buatkan penambahan biaya lansiran dalam perencanaan
		- 2018	Tidak tercapai	Tdk efektif	- Kurangnya biaya	Rencanakan kebutuhan biaya perbaikan per unit rumah
					- Skup pekerjaan yang banyak	Lakukan kajian jumlah skup pekerjaan terkait biaya
					- Data MCK kurang lengkap	Detailkan data RTLH, dan buat pendataan dengan sistem elektronik dari tingkat desa.
3	Efisiensi	- 2016	Tidak tercapai	Tidak efisien	- Kurangnya alokasi dana	Rencanakan kebutuhan biaya perbaikan per unit rumah
		- 2017	Tidak tercapai	Tidak efisien	- Skup pekerjaan banyak	Masukkan penambahan biaya lansiran dalam perencanaan
		- 2018	Tidak tercapai	Tidak efisien		Lakukan kajian jumlah skup pekerjaan terkait biaya

## 5 SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya peningkatan Program BSPS di Kabupaten Tabanan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Indikator yang tidak tercapai yaitu:

- Indikator anggaran/ biaya dari tahun 2016 sampai dengan 2020.
- Indikator tepat tujuan dari tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Indikator efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

2. Penyebab tidak tercapainya indikator:

- Indikator anggaran/ biaya dari tahun 2016 sampai dengan 2020: Tidak ada perencanaan/ perhitungan biaya perbaikan per unit rumah, alokasi anggaran kurang dari program BSPS, tidak ada dana pendamping dari Pemda, Kurangnya peran serta CSR.
- Indikator tepat tujuan dari tahun 2016 sampai dengan 2018: bencana alam, biaya lansiran bahan, kurangnya biaya, skup pekerjaan yang banyak, data MCK kurang lengkap.

- Indikator efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan 2018: Kurangnya alokasi dana, skup pekerjaan banyak.
3. Upaya peningkatan:
- Indikator anggaran/ biaya dari tahun 2016 sampai dengan 2020: Rencanakan kebutuhan biaya perbaikan per unit rumah, buat usulan berbasis perencanaan dan target RLH, rencanakan alokasikan anggaran dalam RPJMD, lakukan koordinasi dan komunikasi dengan CSR.
  - Indikator tepat tujuan dari tahun 2016 sampai dengan 2018: buat Juklak dan Juknis pelaksanaan program saat bencana alam, buat penambahan biaya lansiran dalam perencanaan, rencanakan kebutuhan biaya perbaikan per unit rumah, lakukan kajian jumlah skup pekerjaan terkait biaya, detailkan data RTLH, dan buat pendataan dengan sistem elektronik dari tingkat desa.
  - Indikator efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan 2018: rencanakan kebutuhan biaya perbaikan per unit rumah, masukkan penambahan biaya lansiran dalam perencanaan, lakukan kajian jumlah skup pekerjaan terkait biaya.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Tabanan agar membuat perencanaan secara menyeluruh yang dimulai dari kebutuhan biaya perbaikan rumah untuk satu unit, sehingga diketahui kebutuhan biaya terhadap seluruh target RLH dalam setiap tahun yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tabanan.

DPUPRKP Kabupaten Tabanan agar merencanakan sumber dana dari rencana kebutuhan biaya perbaikan rumah dalam setiap tahun.

CSR dan komunitas perbaikan rumah yang khususnya ada di wilayah kabupaten Tabanan agar ikut lebih berperan dalam mewujudkan RLH di Kabupaten Tabanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta. PT bumi aksara
- Irwanto. (2006). *Focus Group Discussion (FGD)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Miles and Huberman (1984). *Analisis data kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI -Press).
- KBBI versi online. *Efektifitas*. URL: <https://www.kbbi.web.id/>.
- Kementrian PAN dan RB. 2014. *Permen PAN dan RB NOMOR 53 TAHUN 2014*. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
- Perda Nomor 11 Tahun 2017. *RPJMD-SB*. Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- Permen PUPR Nomor : 21/PRT/M/2016. 2016. MBR. Biro Hukum KemenPUPR.
- Permen PUPR Nomor: 10/PRT/M/2019. 2019. MBR. Biro Hukum KemenPUPR
- Permen PUPR Nomor, 13/PRT/M/2016. 2016. BSPS. Biro Hukum KemenPUPR.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung.Alfabeta.
- Purwanto. (2012). *PDCA*. <http://repository.umy.ac.id/> [akses: 8 Maret 2021]
- W Wirawan. (2012). *Evaluasi Program*. Jurnal: Manajemen Pendidikan. vol 3.